Miftah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
4 (2) , October 2026 Page : 407-413 / e-ISSN : 2986-982X
DOI : https://doi.org/10.61231/974qqp62
Creative Commons - Attribution 4.0 International - CC BY 4.0
Received: 22-05- 2026 Accepted: 15-07- 2026 Published: 31-10-2026

Analisis Etika Bisnis Islam dalam Tata Kelola Digitalisasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Era Society 5.0

Anna Putri Syafitri[1)], Niswatin Mubarriroh[2)], Agus Suaidi Hasan[3)]

[1,2,3] Universitas Sunan Gresik, Jawa Timur, Indonesia

Email: ap.syafitri@lecturer.usg.ac.id[1], n.mubarriroh@lecturer.usg.ac.id[2], as.hasan@lecturer.usg.ac.id[3]

Correspondence : ap.syafitri@lecturer.usg.ac.id[*]

Abstract: *This research aims to analyze the ethics of digitalization governance at Trijaya Village-Owned Enterprises (BUMDes) in the Society 5.0 era. The research used a qualitative approach with field research methods carried out in Wadeng Village, Sidayu District, Gresik Regency. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation with informants from the Village Head, Head of BUMDes, and BUMDes Treasurer. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the digitalization governance of BUMDes Trijaya has not been running optimally. The main problem found was the low quality of human resources (HR) in operating the digital system, so that recording transactions and financial reports was still done manually. This condition causes low transparency, accountability and effectiveness of BUMDes financial management. Apart from that, managers who hold other jobs also cause less than optimal professionalism and focus in managing village businesses.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika tata kelola digitalisasi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Trijaya di era Society 5.0. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode* field research *yang dilakukan di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan Bendahara BUMDes. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola digitalisasi BUMDes Trijaya belum berjalan optimal. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengoperasian sistem digital, sehingga pencatatan transaksi dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Kondisi ini menyebabkan rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, pengelola yang merangkap pekerjaan lain menyebabkan kurang optimalnya profesionalitas dan fokus dalam pengelolaan usaha desa.*

Keywords : *Digitalization, Digital Ethics, BUMDes, Good Governance, Society 5.0*

PENDAHULUAN

Potensi ekonomi yang besar dimiliki oleh setiap desa, baik dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif. Namun, apabila tidak menggunakan pengelolaan yang tepat, potensi tersebut tidak akan bisa berkembang secara baik. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen dalam penguatan ekonomi berbasis masyarakat desa. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam mengelola sumber daya

lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan (Desi dan Salis, 2025).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan, diatur, dan dikelola oleh desa untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kebiasaan masyarakat desa adalah dengan hidup yang sederhana, baik dalam hal pola pikir maupun dalam kegiatan sehari-hari. Kebiasaan ini menjadikan kurang maksimal dalam kemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam, yang bisa dijadikan sebagai modal sosial dan penguatan kesejahteraan yang menjanjikan (Martoyo, Hasanah, dan Karimah, 2024).

Permasalahan teknologi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) seringkali menjadi tantangan utama dalam pengembangan dan peningkatan kinerja mereka. Tantangan utama yang dihadapi oleh BUMDes adalah minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam operasional sehari-hari (Maulana dkk, 2025). Teknologi digital yang kini telah menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi usaha, belum sepenuhnya diadopsi. Pengelola BUMDes sebagian besar masih menggunakan metode manual dalam pencatatan, pengelolaan keuangan, dan pemasaran. Hal ini dapat berdampak melambatnya proses operasional dan menurunkan daya saing mereka di era global.

Pada era digital saat ini, hampir semua aktivitas bisa dilakukan secara digital, karena itu era digital bukan menjadi satu alasan terkait masalah kesiapan atau pilihan, melainkan sebuah konsekuensi. (Uus dkk, 2024). Adanya digital menjadikan tanggung jawab untuk perubahan signifikan pada manusia dalam cara mengelola dan memanfaatkan data di berbagai sektor, mulai dari bisnis, kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan data menjadi aset yang sangat berharga. Data yang dikelola dengan baik akan memberikan wawasan yang bermanfaat, memberi dukungan dalam pengambilan keputusan strategis dan bisa meningkatkan efisiensi operasional. Dalam tata Kelola data meliputi kebijakan, proses dan prosedur untuk bisa memastikan kualitas, keamanan dan kepatuhan data terhadap regulasi yang berlaku. Namun, meskipun ada upaya yang signifikan dalam mengembangkan tata kelola data, masih banyak organisasi yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika profesional yang relevan dengan pengelolaan data mereka (Michael dan Jadiaman, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan di BUMDes Trijaya, Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Studi pada BUMDes Trijaya yang sudah menggunakan digitalisasi dalam tata kelola keuangan dapat memberikan wawasan tentang faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi. Adanya kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, serta strategi yang dugankaan dalam tata kelola digitalisasi

pada era society 5.0. hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan panduan bagi BUMDes lain yang juga berencana melakukan pengelolaan digitalisasi pada usahanya tersebut. Penelitian pada BUMDes ini memungkinkan peneliti untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan yang menjadi kelemahan dalam tata kelola digitalisasi BUMDes Trijaya.

Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode atau Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Wadeng, Ketua BUMDes Trijaya, dan Bendahara BUMDes Trijaya. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui tahapan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan guna mengidentifikasi pola-pola dalam tata kelola, tantangan, serta strategi yang diterapkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai analisis etika dalam tata kelola digitalisasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada era society 5.0 guna meningkatkan keberlanjutan ekonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi utama dalam menjamim keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dijadikan sebagai motor penggerak ekonomi lokal adalah pengelolaan yang baik. Dalam implementasinya, prinsip *good governance* harus mampu dijalankan oleh BUMDes, yang didalamnya meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dalam pengelolaan usaha. Karena, prinsip ini digunakan untuk menciptakan sistem manajemen yang professional, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh benar-benar kembali kepada masyarakat desa (Pengembangan et al. 2025). Namun, dalam praktiknya masih banyak kendala yang dihadapi oleh BUMDes dalam menerapkan sistem tata kelola yang baik.

Salah satu yang menjadi tantangan utama di dalam BUMDes adalah kurangnya sumber daya manusia dalam operasional usaha, terutama dalam tata kelola digitalisasi pada laporan keuangan yang sudah disediakan. Banyak BUMDes yang masih mengelola keuangan dan administrasi secara manual tidak menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Sehingga mengakibatkan pencatatan keuangan yang tidak terstruktur dengan baik. Kondisi ini menjadikan tidak adanya transparansi dalam pelaporan keuangan, yang bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Adanya sistem akuntansi yang telah diberikan bertujuan untuk memperjelas dan transparansi dalam pengelolaan BUMDes, untuk bisa mengukur sejauh mana kinerja BUMDes dalam memberikan manfaat ekonomi bagi desa.

Pemilihan pengelola BUMDes, terutama pada laporan keuangan masih menjadi kendala serius dalam memastikan efektivitas manajemen usaha desa. Karena, kebanyakan desa yang menjadi pengelola

BUMDes adalah orang-orang yang tidak hanya fokus dalam satu bidang saja, hal ini menjadikan tidak fokus dalam pengelolaan BUMDes.

Di era digital, penerapan teknologi dalam sistem tata kelola BUMDes menjadi salah satu Langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha desa (Rohayatin et al, 2024). Tetapi pada implementasinya, banyak BUMDes dalam melakukan operasional dan laporan keuangan belum memanfaatkan teknologi digital yang sudah disediakan. Pencatatan transaksi beserta laporan keuangan masih dilakukan secara manual, yang tidak hanya memperlambat proses pelaporan tetapi juga bisa meningkatkan risiko kesalahan dalam pencatatan keuangan. Oleh karena itu, tata kelola digitalisasi di BUMDes perlu dioptimalkan, misalnya sumber daya manusia untuk pengelolaan laporan keuangan digitalisasi hanya fokus satu bidang saja. Agar BUMDes benar-benar di perhatikan setiap perjalanannya. Dengan itu, bisa meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan juga bisa terus mengetahui perkembangan BUMDes setiap tahunnya.

Keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat bergantung pada penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai Lembaga ekonomi desa. Tetapi, sebagai instrument pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, tata kelola yang professional menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan msayarakat. Secara teoritis, konsep *good governance* menekankan adanya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektifivitas, dan responsivitas dalam pengelolaan organisasi. Menurut Mardiasmo (2018), tata Kelola yang baik dalam sektor public bertujuan untuk menciptakan pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga public. Dalam konteks BUMDes, prinsip tersebut menjadi dasar penting agar pengelolaan usaha desa tidak hanya berorientasi pada keuntunga, tetapi juga pada manfaat sosial bagi masyarakat desa.

Selain aspek tata Kelola, etika juga menjadi unsur penting dalam pengelolaan BUMDes. Etika organisasi berkaitan dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan integritas dalam menjalanan Amanah pengelolaan usaha desa. Menurut Bertens (2013). Etika merupakan nilai dan norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam bertindak. Dalam pengelolaan BUMDes, etika diperlukan agar setiap pengelola mampu menjalankan tugas secara jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Rendahnya transparansi laporan keuangan yang masih dilakukan secara manual dapat memunculkan potensi pelanggaran etika, seperti manipulasi data, penyalahgunaan dana, maupun konflik kepentingan.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan administrasi dan laporan keuangan digital. Banyak pengelola BUMDes masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan

keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan tata Kelola modern belum berjalan secara optimal. Menurut teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Gart Becker (1993), kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Rendahnya kompetensi digital pengelola BUMDes menyebabkan proses adminitrasi menjadi lambat, tidak akurat, dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan keuangan.

Dari sisi etika kerja, terdapat kurangnya kompetensi dan profesionalisme pengelola yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelola yang tidak fokus karena merangkat pekerjaan lain dapat menyebabkan tanggung jawab terhadap pengelolaan BUMDes menjadi kurang optimal. Hal ini bertentangan dengan etika professional yang menuntut adanya tanggung jawab, disiplin, dan komitmen dalam menjalankan pekerjaan. Menurut Franz Magnis-Suseno, etika kerja berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan bersama dibanidng kepentingan pribadi.

Menurut Franz Magnis-Suseno, etika kerja berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan Bersama dibanding kepentingan pribadi. Selain itu, penggunaan sistem manual juga berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Transparansi laporan keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dalam teori akuntabilitas public, organisasi yang tidak mampu menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan sistematis akan mengalami penurunan legitimasi sosial dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dapat meningkatkan peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Permasalahan lain yang muncul adalah pengelola BUMDes yang menerapkan banyak pekerjaan sehingga tidak dpaat fokus dalam menjalankan operasional usaha desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem manajemen organisasi BUMDes. Berdasarkan teori manajemen organisasi dari George R. Terry, efektivitas organisasi dipengaruhi oleh pembagian tugas yang jelas, pengawasan yang baik, dan penempatan SDM sesuai kompetensi. Ketika pengelola BUMDes tidak memiliki fokus kerja yang jelas, maka pengelolaan usaha menjadi kurang maksimal dan berdampak pada lambatnya perkembangan BUMDes.

Di era digital, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan penting dalam meningkatkan efektivitas tata Kelola organisasi, termasuk BUMDes. Digitalisasi laporan keuangan dapat membantu proses pencatatan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Menurut teori *Tevhnology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Fred Davis (1989), penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi tersebut. Dalam kasus BUMDes, rendahnya

pemanfaatan sistem digital dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman SDM terhadap penggunaan teknologi serta minimnya pelatihan yang diberikan.

Dari perspektif etika digital, penggunaan teknologi dalam BUMDes juga harus memperhatikan prinsip kejujuran, keamanan data, dan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan. Sistem digital tidak hanya digunakan untuk mempermudah pekerjaan, tetapi juga untuk menciptakan budaya kerja yang transparan dan professional. Oleh karena itu, pengelola BUMDes perlu memiliki kesadaran etis dalam menggunakan teknologi agar data keuangan desa tidak disalahgunakan dan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi tata Kelola digitalisasi BUMDes perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, pembagian tugas yang lebih fokus, penerapan sistem keuangan digital secara konsisten, serta penguatan etika organisasi dan etika kerja. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan usaha desa sehingga BUMDes dapat berkembang seacra berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, tata Kelola digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Trijaya, belum berjalan secara optimal meskipun telah tersedia sistem digital untuk mendukung pengelolaan administrasi dan laporan keuangan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengoperasian sistem digital, sehingga sebagian besar pencatatan transaksi dan laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Kondisi tersebut menyebabkan proses adminisrasi menjadi kurang efektif, berisiko terjadi kesalahan pencatatan, serta menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Selain itu, kurangya fokus pengelola BUMDes karena merangkap pekerjaan lain turut mempengaruhi efektivitas pengelolaan usaha desa. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas dan pembagian tugas dalam organisasi BUMDes masih perlu diperbaiki agar pengelolaan usaha dapat berjalan lebih maksimal. Dalam perspektif *good governance*, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam tata kelola BUMDes Trijaya. Dari aspek etika, pengelolaan BUMDes memerlukan penerapan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan profesinalisme dalam menjalankan Amanah pengelolaan usaha desa. Penggunaan sistem manual yang belum terintegrasi secara digital dapat membuka peluag terjadinya penyalahgunaan data, kurangnya keterbukaan laporan keuangan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Oleh karena itu, etika organisasi dan etika kerja menjadi faktor penting dalam mendukung tata kelola digitalisasi yang transparan dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.

Bertens, K. (2013). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Davis, F. D. (1989). "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology." *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.

Martoyo, Hasanah Hikmatul, Karimah Alisa Sahlatul. (2024). Penguatan Literasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Syariah di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember. AKM: Aksi Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 343-352.

Maulana Jaka, dkk. (2025). Penerapan Digitalisasi Untuk Meningkatkan Produktivitas BUMDes Di Era Digital. Abdi Laksana : Jurnal Pengabdia Kepada Masyarakat, 6(1), 134-141.

Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Michael dan Jadiaman Parhusip. (2025). Integrasi Prinsip Etika Profesional dalam Data Governance untuk Mendukung Keamanan dan Akurasi Informasi di Era Digital. MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research, 2(1), 828-834

Pengembangan, Jurusan, Masyarakat Islam, Universitas Islam, and Negeri Sumatera Utara. (2025). "Published: 3 Januari 2025" 3:24–30.

Rohayatin, Titin, Dadan Kurnia, Noer Apptika Fujilestari, Siti Munawaroh. (2024). "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Melalui Tata Kelola Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penerapan E-Government Di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang" 06 (01): 1–10.

Setianingsih, Desi dan Salis M Abduh. (2025). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Lokal. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(3), 965-974.

Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.